BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan mengenai kesimpulan dari semua hasil temuan data dilapangan serta saran dari penulis yang diharapkan mampu menjadi perbaikan untuk selanjutnya. Secara umum penelitian ini telah menjawab semua sasaran yang menjadi fokus penelitian.

5.1. Kesimpulan

Hasil dari analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Potensi perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Kertajati terlihat sangat signifikan dari mulai penggunaan lahan pertanian berkurang sebesar 50% atau seluas 7223.24 Ha, perubahan permukinan sebesar 14.4% atau seluas 3092.5 Ha, perubahab penggunaan lahan permukinan berubah menjadi Kertajati *Aeorocity*. Perubahan kolam atau tubuh air sebesar 10.2% atau seluas 1912.41 Ha, perubahan hutan sebesar 1.7% atau seluas 319.93 Ha,. Untuk lahan yang berubah dengan pembangunan BIJB yaitu sebesar 10.1% atau seluas 1897.5 Ha dan Industri sebesar 21.88% atau seluas 2563.7.
2. Teridentifikasinya Kebijakan Pemerintah Daerah Terkait Pembangunan BIJB Yang Berdampak Pada Perubahan Dari Pedesaan Menjadi Perkotaan dilihat dari *Management Support*.
    (1) Provinsi Jawa Barat
        - RTR KSP BIJB dan Kertajati *Aerocity*
        - RTRW Provinsi Jawa Barat
        - Perda No 13 Tahun 2010 tentang Kertajati *Aerocity*

    Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan ditemukan beberapa implementasi pembangunan yang tidak sesuai dengan indikasi program RTR KSP BIJB dan Kertajati *Aerocity.* Diantaranya rencana yang sedang dilaksanakan pada tahu 2015 yaitu pengembangan pendidikan dasar sampai dengan tinggi, pembangunan sarana dan prasarana BIJB dan kawasan pariwisata (Kertajati *Aerocity*). Sedangkan rencana yang belum dilaksanakan

adalah kawasan indutri, jaringan kereta api, pembangunan terminal terpadu dan pembangunan jaringan jalan baru.

(2) Kabupaten Majalengka

Pemerintahan Kabupaten Majalengka belum sepenuhnya mempersiapakan peraturan terkait BIJB. Peraturan secara teknis yang sudah dibuat yaitu, RTRW, RDTR (prolegda), pemetaan ketenagakerjaan dll. Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka harus membuat peraturan seperti Perda RDTR, RTBL, RRTR, pajak daerah, Peraturan Bupati tengtang KKOP, Perda LP2B selain itu yang paling penting yaitu mengenai kebijakan pemetaan ketenagakerjaan untuk mengurangi pengangguran di Kecamatan Kertajati. Sedangkan peraturan atau kebijakan non teknis baru sebatas rencana dan program. Selain itu pemerintah harus secara dini mengadakan kajian dampak perubahan sosial.

3. Teridentifikasinya kelayakan masyarakat dilihat dari aspek usia, pendidikan terakhir dan pekerjaan, kondisi eksisting kelayakan bisa dikatakan kurang sesuai dengan rencana pembangunan BIJB yang berdampak dari pedesaan menjadi perkotaan. Teridentifikasi kesiapan masyarakat menjadi dua *cluster* yaitu *cluster* siap dan tidak siap. *Cluster* 1 merupakan *cluster* siap dengan persentase 83% dan *cluster* 2 yang merupakan *cluster* tidak siap dengan persentase 17%. Ini menyatakan terdapat perbedaan antara aspek kelayakan dan aspek resistensi. Siap dalam aspek resistensi ini dapat dirtikan bahwa masyarkat tersebut siap menerima keadaan. Berupa dampak perubahan kearah urban, salah satunya yaitu siap dalam menghadapi pembangunan BIJB dan siap untuk berpindah akibat alih fungsi lahan. Kemudian analisis *crosstabulation* menghasilkan tidak ada kaitanya antara kelompok kesiapan berdasarkan resistensi terhadap perubahan dengan aspek-aspek kelayakan.

5.2.Arahan

Hasil dari analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada penelitian ini dapat diberikan arahan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Majalengka sudah mempersiapakan peraturan secara teknis tetapi belum mepersiapkan peraturan secara non teknis. Maka

dari itu pemerintah Kabupaten Majalengka harus terlebih dahulu mempersiapakan peraturan atau kebijakan non teknis. Seperti kajian dampak sosial masyarakat, pemetaan ketenagakerjaaan dan program-program untuk mengantisipasi lebih dini dampak perubahan yang akan dihadapi dimasa yang akan datang

2. Dari hasil analisis yaitu kesiapan masyarakat sebesar 87% siap dan 13% tidak siap. Tetapi jika dilihat dari segi kelayakan, tingkat pendidikan dan keterampilan yang masih rendah. Dalam hal ini tidak sesuai dengan perubahan dimasa yang akan datang yaitu menuju perkotaan atau urban. Walaupun masyarakat mengatakan bahwa dirinya siap tetapi siap dalam kontek ini adalah kebersediaan masyarakat dalam menghadapi dan mendukung pembangunan BIJB. Maka dari itu harus diadakannya program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan daya saing.